

eJournal Pemerintahan Integratif, 2026, 12 (04): 529-540
ISSN: 2337-8670 (online), ISSN 2337-8662 (print), ejournal.pin.or.id
© Copyright 2025

**EVALUASI PROGRAM BANTUAN
LANGSUNG TUNAI (BLT) DI KABUPATEN
KUTAI BARAT (STUDI KASUS DI
KAMPUNG GEMUHAN ASA KABUPATEN
KUTAI BARAT)**

Dedi Kristian

**eJournal Pemerintahan Integratif
Volume 12, Nomor 04, 2026**

EVALUASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI KABUPATEN KUTAI BARAT (STUDI KASUS DI KAMPUNG GEMUHAN ASA KABUPATEN KUTAI BARAT)

Dedi Kristian¹, Yahdi Qolbi²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Kampung Gemuhan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, menggunakan teori evaluasi formatif dan sumatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap aparat kampung, Badan Permasyarakatan Kampung (BPK), ketua RT, dan masyarakat penerima BLT. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan evaluasi formatif, pelaksanaan BLT telah dilaksanakan melalui proses pendataan, verifikasi, dan penetapan penerima secara partisipatif melalui musyawarah kampung sehingga sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan. Berdasarkan evaluasi sumatif, program BLT memberikan manfaat dalam membantu memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga dan menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan miskin. Namun, efektivitas program masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kuota penerima serta perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang memengaruhi ketepatan sasaran bantuan.

Kata Kunci : *evaluasi formatif, evaluasi sumatif, bantuan langsung tunai, dana desa.*

Pendahuluan

Kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan pembangunan di Indonesia sehingga pemerintah terus mengembangkan berbagai program

¹ Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: asiyaap@gmail.com

² Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

perlindungan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu kebijakan tersebut adalah Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang bertujuan membantu masyarakat miskin dan rentan miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar serta menjaga daya beli rumah tangga (Sumarto, S., & Suryahadi, 2021). Pelaksanaan program ini mengutamakan prinsip tepat sasaran, transparansi, dan partisipasi masyarakat agar bantuan yang diberikan mampu mencapai tujuan kebijakan secara efektif (Wati et al., 2023).

Kabupaten Kutai Barat merupakan salah satu daerah yang masih menghadapi permasalahan kemiskinan meskipun pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif. Pada tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kutai Barat mencapai 14,49 ribu jiwa (BPS Kabupaten Kutai Barat, 2024). Salah satu kampung yang melaksanakan Program BLT Dana Desa adalah Kampung Gemuhan Asa, Kecamatan Barong Tongkok. Sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani dan nelayan sehingga kondisi ekonomi sangat dipengaruhi oleh hasil panen dan tangkapan ikan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah kampung telah melakukan pendataan dan penetapan penerima melalui musyawarah kampung. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan kuota penerima bantuan serta perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang memengaruhi ketepatan sasaran penerima manfaat.

Berbagai penelitian mengenai Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) telah banyak dilakukan, terutama yang membahas efektivitas penyaluran bantuan, ketepatan sasaran, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada hasil akhir program, sedangkan kajian yang menganalisis proses pelaksanaan menggunakan perspektif evaluasi formatif dan evaluasi sumatif pada tingkat kampung masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan mengevaluasi Program BLT di Kampung Gemuhan Asa menggunakan teori evaluasi William N. Dunn sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai proses pelaksanaan maupun hasil kebijakan.

Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tidak hanya dipandang sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan, tetapi juga merupakan bagian dari kebijakan perlindungan sosial yang bertujuan menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat di tingkat desa. Dalam konteks pemerintahan desa, keberhasilan implementasi BLT sangat dipengaruhi oleh kapasitas pemerintah desa dalam melakukan pendataan, verifikasi, penetapan penerima manfaat, hingga pengawasan terhadap proses penyaluran bantuan. Oleh karena itu, kualitas tata kelola pemerintahan desa menjadi faktor yang menentukan efektivitas program, karena pemerintah desa merupakan aktor yang berhadapan langsung dengan masyarakat penerima manfaat.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Kampung Gemuhan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat

menggunakan teori evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai proses pelaksanaan, pencapaian tujuan program, serta kendala yang dihadapi sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan BLT Dana Desa.

Kerangka Dasar Teori

Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan proses sistematis untuk menilai pelaksanaan dan hasil suatu kebijakan guna mengetahui tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Dunn, 2018). Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut Menurut Navlia & Aini, (2024) yang membedakan evaluasi ke dalam dua pendekatan, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Kedua pendekatan tersebut dipilih karena mampu memberikan penilaian yang komprehensif terhadap proses pelaksanaan maupun hasil akhir suatu program.

Evaluasi formatif berfokus pada proses pelaksanaan kebijakan, meliputi mekanisme pendataan, verifikasi, penetapan penerima manfaat, serta pelaksanaan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Evaluasi ini bertujuan mengidentifikasi berbagai kelebihan dan kendala selama implementasi sehingga dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan.

Sementara itu, evaluasi sumatif berfokus pada pencapaian tujuan dan dampak program setelah dilaksanakan. Dalam penelitian ini, evaluasi sumatif digunakan untuk menilai sejauh mana Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa mampu membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, mempertahankan daya beli rumah tangga, serta mencapai sasaran penerima manfaat sesuai dengan tujuan kebijakan. Melalui kedua pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan Program BLT Dana Desa di Kampung Gemuhan Asa.

Evaluasi kebijakan pada hakikatnya merupakan tahapan yang tidak dapat dipisahkan dari siklus kebijakan publik. Melalui evaluasi, pemerintah dapat mengetahui apakah suatu kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan desain awal serta mampu menghasilkan dampak sebagaimana yang diharapkan. Informasi yang diperoleh dari proses evaluasi menjadi dasar bagi pengambil kebijakan untuk mempertahankan, memperbaiki, bahkan menghentikan suatu program apabila dinilai tidak lagi efektif. Oleh karena itu, evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukuran keberhasilan, tetapi juga sebagai mekanisme pembelajaran bagi penyelenggara pemerintahan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Dana Desa di Kampung Gemuhan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman secara mendalam mengenai proses pelaksanaan program, pencapaian tujuan, serta kendala yang dihadapi dalam implementasinya.

Teknik pengumpulan data meliputi :

1. Observasi
2. Wawancara mendalam dan
3. Dokumentasi

Analisis data menggunakan model (Spradley & Huberman, 2024). yaitu : Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan.

Penelitian ini dilakukan di Kampung Gemuhan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. Lokasi ini dipilih berdasarkan tingkat kemiskinan yang masih tinggi dan informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan metode purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan spesifik, yang dianggap berpengetahuan dan memahami isu-isu yang diteliti. Informan tersebut meliputi pejabat pemerintah Kampung, penerima program, dan tokoh masyarakat. Dengan melibatkan berbagai pihak ini, diharapkan data yang diperoleh akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan objektif tentang kondisi di lapangan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Evaluasi Formatif Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Evaluasi formatif digunakan untuk menilai proses pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana mekanisme pelaksanaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi selama implementasi. Dalam penelitian ini, evaluasi formatif dianalisis melalui dua aspek utama, yaitu perencanaan program dan pelaksanaan program.

Perencanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan Program BLT di Kampung Gemuhan Asa telah dilaksanakan melalui proses pendataan, verifikasi, dan penetapan calon penerima manfaat yang melibatkan ketua RT, aparat kampung, Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), serta masyarakat melalui musyawarah kampung. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah kampung dalam menerapkan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sehingga proses penetapan penerima bantuan dilakukan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat (Wati et al., 2023).

Berdasarkan perspektif evaluasi formatif, proses perencanaan telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam kebijakan pemerintah. Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan menjadi bentuk pengawasan

sekaligus verifikasi untuk meminimalkan kesalahan sasaran. Meskipun demikian, perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang bersifat dinamis mengharuskan pemerintah kampung melakukan pemutakhiran data penerima secara berkala agar pelaksanaan Program BLT semakin tepat sasaran.

Untuk memperjelas perencanaan yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut ini adalah dokumentasi kegiatan yang menggambarkan proses musyawarah pemerintah kampung dalam menentukan penerima program BLT.

Gambar Musyawarah Pemerintah Kampung Dalam Menentukan Penerima Program BLT



Evaluasi kebijakan pada hakikatnya merupakan tahapan yang tidak dapat dipisahkan dari siklus kebijakan publik. Melalui evaluasi, pemerintah dapat mengetahui apakah suatu kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan desain awal serta mampu menghasilkan dampak sebagaimana yang diharapkan. Informasi yang diperoleh dari proses evaluasi menjadi dasar bagi pengambil kebijakan untuk mempertahankan, memperbaiki, bahkan menghentikan suatu program apabila dinilai tidak lagi efektif. Oleh karena itu, evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukuran keberhasilan, tetapi juga sebagai mekanisme pembelajaran bagi penyelenggara pemerintahan.

Sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh Wati et al. (2023) yang menyatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan Program BLT sangat dipengaruhi oleh proses pendataan yang partisipatif dan mekanisme verifikasi yang akurat. Keterlibatan pemerintah kampung, BPK, dan ketua RT dalam penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan.

Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Kampung Gemuhan Asa telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan pemerintah (Rofika et al., 2025). Penyaluran bantuan dilakukan secara

bertahap kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat berdasarkan hasil musyawarah kampung. Pemerintah kampung juga melakukan koordinasi dengan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) serta ketua RT untuk memastikan proses penyaluran berjalan tertib, transparan, dan dapat diterima oleh masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah kampung dalam menjalankan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan perspektif evaluasi formatif, pelaksanaan Program BLT telah berjalan dengan baik karena setiap tahapan penyaluran dilaksanakan sesuai prosedur serta melibatkan berbagai pihak dalam proses pengawasan. Meskipun demikian, perubahan kondisi ekonomi masyarakat serta keterbatasan kuota penerima masih menjadi kendala dalam pelaksanaan program. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang berkelanjutan serta pemutakhiran data penerima manfaat agar pelaksanaan Program BLT dapat semakin efektif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Nurdiansah dan Permatasari (2025) yang menjelaskan bahwa koordinasi antara pemerintah desa, perangkat desa, dan unsur masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi BLT Dana Desa. Pada penelitian ini, koordinasi tersebut terlihat melalui keterlibatan pemerintah kampung, BPK, dan ketua RT dalam mengawasi proses penyaluran bantuan sehingga pelaksanaan program dapat berjalan sesuai prosedur. Meskipun masih terdapat kendala berupa keterbatasan kuota penerima, mekanisme pelaksanaan secara umum telah mencerminkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Evaluasi Sumatif Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Evaluasi sumatif bertujuan untuk menilai hasil akhir pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, termasuk tingkat ketercapaian tujuan program serta manfaat yang diterima masyarakat. Dalam penelitian ini, evaluasi sumatif dianalisis melalui aspek ketepatan sasaran dan dampak program terhadap masyarakat penerima manfaat.

Ketepatan Sasaran Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Berdasarkan temuan di lapangan menunjukkan bahwa penyaluran Program BLT di Kampung Gemuhan Asa secara umum telah tepat sasaran (Ida, 2021). Sebagian besar penerima bantuan merupakan masyarakat yang tergolong miskin dan rentan miskin dengan mata pencaharian sebagai petani, nelayan, dan buruh harian yang memiliki pendapatan tidak tetap. Penetapan penerima dilakukan berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi yang melibatkan ketua RT, aparat kampung, Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), serta disepakati melalui musyawarah kampung. Mekanisme tersebut mendukung penyaluran bantuan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria sesuai ketentuan program.

Berdasarkan perspektif evaluasi sumatif, Program BLT di Kampung Gemuhan Asa telah mencapai tujuan utamanya, yaitu memberikan bantuan

kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Meskipun demikian, penelitian menemukan bahwa keterbatasan kuota penerima menyebabkan masih terdapat masyarakat yang memenuhi kriteria, tetapi belum dapat memperoleh bantuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketepatan sasaran tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas pendataan, tetapi juga oleh keterbatasan alokasi penerima yang telah ditetapkan dalam kebijakan. Oleh karena itu, pemutakhiran data penerima secara berkala serta penyesuaian kuota berdasarkan kondisi riil masyarakat diperlukan agar pelaksanaan program semakin efektif dan tepat sasaran.

Hasil penelitian mendukung dan sejalan dengan penelitian Ida (2021) yang menyatakan bahwa ketepatan sasaran merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan Program BLT. Dalam penelitian ini, mayoritas penerima telah memenuhi kriteria sebagai masyarakat miskin dan rentan miskin sehingga tujuan kebijakan secara umum telah tercapai. Akan tetapi, keterbatasan kuota penerima menyebabkan masih terdapat masyarakat yang layak menerima bantuan namun belum dapat diakomodasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas program tidak hanya ditentukan oleh akurasi pendataan, tetapi juga oleh kebijakan alokasi penerima manfaat.

Dampak Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) memberikan manfaat nyata bagi masyarakat penerima di Kampung Gemuhan Asa, terutama dalam membantu memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Bagi masyarakat yang berprofesi sebagai petani, nelayan, dan buruh harian, bantuan tersebut juga berperan dalam menjaga daya beli ketika pendapatan mengalami penurunan akibat faktor cuaca maupun kondisi ekonomi. Temuan ini menunjukkan bahwa BLT berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial yang mampu mengurangi beban ekonomi keluarga penerima manfaat.

Berdasarkan perspektif evaluasi sumatif, Program BLT telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka pendek melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan pengurangan beban ekonomi keluarga penerima manfaat. Namun demikian, dampak program belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan karena nilai bantuan yang terbatas dan sifatnya sebagai bantuan sosial sementara. Oleh karena itu, pelaksanaan BLT perlu didukung dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat agar manfaat yang dihasilkan tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

Berdasarkan temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian Wibawani et al. (2021) yang menyatakan bahwa BLT Dana Desa berfungsi sebagai jaring pengaman sosial dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar.

Bantuan tunai yang diterima masyarakat Kampung Gemuhan Asa terbukti mampu menjaga daya beli rumah tangga, terutama bagi kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan tidak tetap. Namun demikian, sebagaimana dikemukakan Awalia et al. (2024), dampak BLT cenderung bersifat jangka pendek apabila tidak diikuti dengan program pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengintegrasikan bantuan sosial dengan program peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat agar manfaat yang dihasilkan lebih berkelanjutan.

Implikasi Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pemerintahan kampung dalam melaksanakan setiap tahapan kebijakan. Proses pendataan, verifikasi, musyawarah kampung, hingga penyaluran bantuan yang dilaksanakan secara partisipatif menjadi faktor penting dalam mendukung tercapainya tujuan program. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas suatu kebijakan publik sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan pemerintah desa dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam implementasi di tingkat lokal.

Dari sisi praktis, penelitian ini memberikan gambaran bahwa pemerintah kampung perlu membangun mekanisme pemutakhiran data masyarakat secara berkala sebagai bagian dari upaya meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat. Perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berlangsung secara dinamis menyebabkan data penerima bantuan tidak dapat hanya mengandalkan pendataan awal. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang berkelanjutan antara pemerintah kampung, Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), ketua RT, serta masyarakat agar proses identifikasi calon penerima bantuan tetap mencerminkan kondisi riil di lapangan.

Selain itu, penelitian ini juga memberikan implikasi terhadap pengembangan evaluasi kebijakan publik, khususnya dalam penerapan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif pada program perlindungan sosial. Evaluasi formatif mampu mengidentifikasi kualitas proses implementasi kebijakan, sedangkan evaluasi sumatif memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan program dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Penggunaan kedua pendekatan tersebut secara bersamaan menghasilkan evaluasi yang lebih komprehensif karena mampu menjelaskan hubungan antara kualitas proses implementasi dengan keberhasilan hasil akhir kebijakan.

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah maupun pemerintah kampung dalam menyempurnakan pelaksanaan Program BLT Dana Desa pada masa mendatang. Upaya peningkatan validitas data penerima manfaat, penguatan koordinasi antarpemangku

kepentingan, serta evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas kebijakan sehingga manfaat bantuan dapat diterima secara lebih tepat sasaran, transparan, dan berkelanjutan.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Kampung Gemuhan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan evaluasi formatif, proses perencanaan dan pelaksanaan program telah dilaksanakan melalui pendataan, verifikasi, serta musyawarah kampung yang melibatkan pemerintah kampung, Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), ketua RT, dan masyarakat. Mekanisme tersebut mencerminkan penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program.

Berdasarkan evaluasi sumatif, Program BLT telah memberikan manfaat bagi masyarakat penerima dalam memenuhi kebutuhan dasar dan menjaga daya beli rumah tangga. Penyaluran bantuan secara umum telah tepat sasaran karena mayoritas penerima merupakan masyarakat miskin dan rentan miskin yang memenuhi kriteria program. Namun demikian, keterbatasan kuota penerima dan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat masih menjadi kendala dalam mewujudkan ketepatan sasaran secara optimal. Oleh karena itu, pelaksanaan Program BLT memerlukan evaluasi dan pemutakhiran data penerima secara berkala agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Penelitian ini memberikan implikasi bahwa evaluasi kebijakan tidak hanya diperlukan untuk menilai keberhasilan suatu program, tetapi juga sebagai dasar dalam memperbaiki proses implementasi kebijakan pada masa mendatang. Penerapan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif dalam penelitian ini memberikan gambaran mengenai pentingnya keseimbangan antara kualitas proses pelaksanaan dan pencapaian hasil program sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menyempurnakan kebijakan BLT di tingkat kampung.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah Kampung Gemuhan Asa disarankan untuk melakukan pemutakhiran data penerima manfaat secara berkala agar penyaluran Program BLT tetap sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, koordinasi antara pemerintah kampung, Badan Permusyawaratan Kampung (BPK), ketua RT, dan masyarakat perlu terus ditingkatkan untuk mendukung ketepatan sasaran dan transparansi dalam pelaksanaan program.

Pemerintah daerah dan pemerintah pusat juga diharapkan dapat mempertimbangkan penyesuaian kuota penerima berdasarkan kondisi riil masyarakat di setiap kampung. Dengan demikian, masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat dapat terakomodasi secara lebih optimal sehingga tujuan Program BLT dalam mendukung kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara lebih efektif.

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji efektivitas Program BLT dengan menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (mixed methods) serta membandingkan pelaksanaan program di beberapa kampung atau desa sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi Program BLT.

Daftar Pustaka

Ida, S. R. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (Blt)

Di Desa Mahe Pasar Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong. *Japb*, 4(2), 1670–1682.

Dunn, william N. (2018). Fifth Edition. *Public Policy Analysis*.

Sumarto, S., & Suryahadi, A. (2021). Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia: Pengalaman Krisis dan Program JPS. *Bandung: Alfabeta*, 8(1), 35–47. <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/13754>

Wati, R. R., Basuki, P., & Suriadi, I. (2023). Dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Lingkungan Punia Karang Kateng, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram. *Jurnal Oportunitas : Ekonomi Pembangunan*, 2(2). <https://doi.org/10.29303/oportunitas.v2i2.520>

Spradley, P., & Huberman, M. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif. *Journal of Management, Accounting and Administration*, 1(2), 77–84.

Rofika, R., Saepudin, E. A., Yulianti, N. C., Ardiansyah, A., & Puspita Sari, D.

(2025). Dampak Kebijakan Bantuan Langsung Tunai terhadap Pengurangan Dampak Ekonomi dari Pandemi COVID-19. *CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 403–413. <https://doi.org/10.62710/c1y2tr44>

Navlia, R., & Aini, N. (2024). Optimalisasi Pendidikan Melalui Evaluasi Program Yang Terstruktur. *Edu Pustaka: Journal of Education and Religious Studies*, 2(2), 2024.

Nurdiansah, T., & Permatasari, A. (2025). Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Desa Karang Agung, Tanjung Palas Utara, Bulungan, Kalimantan Utara *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu ...*, 12, 1–12.

Wibawani, S., Hernanda, F., Kusuma, R. G., & Irawan, F. A. (2021). Evaluasi Program BLT Dana Desa Sebagai Jaring Pengaman Sosial DI Desa Kemlagi, Kabupaten Mojokerto. *Syntax*.